

**FUNGSI DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014-2019
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
SRIFAAINI
1810012111174

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM
PADANG
2022

Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

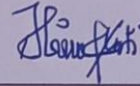
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : SRIFAAINI
Nomor : 1810012111174
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Fungsi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
Periode 2014-2019 Dalam Pembentukan Peraturan
Daerah**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing)



FUNGSI DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2014-2019 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Srifaaini¹,Maiyestati²,
Program Studi Ilmu Hukum,Falkultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: srifaaini4@gmail.com

ABSTRACT

In implementing regional autonomy, the regional government and DPRD are given the right by the central government to form regional regulations (perda). This right is a constitutional right that is explicitly stated in Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. DPRD as a Regional Legislative Institution. Research objectives 1) to analyze the function of DPRD for the 2014-2019 period in drafting the Kuantan Singingi Regional Regulation ? 2) to analyze the obstacles faced by DPRD for the 2014-2019 period in preparing the Kuantan Singingi Regional Regulation? 3) to analyze the DPRD's efforts to overcome the obstacles in drafting the Kuantan Singingi Regional Regulation? The research method is juridical sociological. The results of the study are 1) The function of the Kuantan Singingi DPRD for the 2014-2019 period has not functioned well, the activeness of DPRD members in discussing the Raperda 2) The obstacles faced by the Kuantan Singingi DPRD, the right of initiative has not been carried out optimally 3) Efforts to overcome these obstacles are the DPRD must frequently participate in the community to explore the problems faced by the community.

Keywords : Function of DPRD local regulations

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk membentuk peraturan daerah (perda). Hak tersebut merupakan hak konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah dilengkapi pula dengan fungsi legislatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah².

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan asas otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai yang dicantumkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Daerah Kuantan Singingi dipimpin oleh kepala daerah yang disebut

¹ Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no.4(2017) : 463-475, hlm 464.

² Jimly Asshiddiqie, 2007 *pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit PT.Bhuana Ilmu Popule, Jakarta, hlm 48

wakil Bupati serta DPRD kabupaten kuantan singingi yang berjumlah 33 anggota DPRD. Dalam pembentukan peraturan daerah kuantan singingi periode 2014-2019 apakah DPRD berfungsi keaktifan dalam pembentukan peraturan Daerah Kuantan Singingi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan penelitian dengan judul **Fungsi DPRD Kabupaten Singingi Periode 2014-2019 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah fungsi DPRD Periode 2014 -2019 dalam menyusun peraturan Daerah Kuantan Singingi ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi DPRD Periode 2014 - 2019 dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis Sumber Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dimana data sudah diperoleh kemudian diolah dan uraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas penelitian ini³

³ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2

3. Apa sajakah upaya DPRD mengatasi kendala-kendala dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa fungsi DPRD periode 2014 -2019 dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi
2. Untuk menganalisa kendala DPRD periode 2014 -2019 dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi
3. Untuk menganalisa upaya apa dilakukan DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah Kuantan Singingi

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. FUNGSI DPRD Periode 2014-2019 dalam pembentukan Peraturan Daerah Kuantan Singingi

Fungsi DPRD periode 2014-2019 dalam menjalankan menyusun peraturan daerah kuantan singingi dilakukan sebanyak 12 perda. Dalam menyusun peraturan daerah secara kinerja anggota dewan periode 2014-2019 tengah mendapatkan sorotan mengingat jumlah perda yang di hasilkan lebih sedikit dibandingkan perda usulan eksekutif yang cukup didapat lembaga tersebut. Dalam kurun lima tahun dihasilkan tersebut di luar dari perda rutin seperti perda APBD maupun APBD perubahan. Semua perda yang di hasilkan periode 2014-2019 sebanyak 24 perda. Termasuk perda APBD maupun APBD perubahan

masuk. Sebanyak 12 perda yang dihasilkan tersebut di luar dari perda rutin seperti perda APBD maupun APBD perubahan. Fungsi legilasi DPRD Kuantan Singingi periode 2014-2019 belum berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan karena perda di hasilkan sedikit dan disebabkan dikarenakan tidak berjalannya atau tidak berfungsinya keaktifan anggota DPRD dalam pembahasan raperda. Hanya satu perda yang dihasilkan oleh DPRD yaitu perda hari jadi Kabupaten kuantan Singingi pada tahun 2016⁴

B. Kendala yang dihadapi DPRD periode 2014-2019 dalam pembentukan peraturan daerah kuantan singingi

Dalam hal penyusunan perda kendala yang masih dihadapi di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi hingga kini telah menyebabkan diantaranya hak inisiatif belum dapat terlaksana secara optimal. Karena kesibukan DPRD dalam melaksanakan tugasnya rutinnya dan formal dengan agenda yang padat seperti menghadiri pertemuan resmi. Tenaga terampil dan kemampuan menganalisa berbagai aspek yang diperlukan dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah yang dimiliki eksekutif masih lebih lengkap dibanding dengan apa yang dimiliki DPRD⁵.

⁴ Wawancara dengan Bapak Solehudin, S.Sos 31 Januari 2022, di kantor DPRD Kuantan Singingi

⁵ Wawancara dengan Bapak Solehudin, S.Sos 31 Januari 2022, di kantor DPRD Kuantan Singingi

C. Upaya DPRD mengatasi kendala dalam pembentukan peraturan daerah kuantan singingi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah DPRD harus sering turun ke masyarakat untuk menggali persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Tingkatkan kemampuan menganalisa dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah agar mampu menghadapi dan meminimalisir kendala tersebut⁶ Pelaksanaan hak inisiatif berupa pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam tahun 2014-2019 dinilai masih belum optimal

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Fungsi DPRD periode 2014-2019 dalam pembentukan peraturan daerah Kuantan Singingi. Fungsi DPRD dalam menyusun peraturan daerah kuantan singingi belum berfungsi dengan baik karena perda yang di hasilkan lebih sedikit dan disebabkan karena tidak berjalan atau tidak berfungsinya keaktifan anggota DPRD dalam pembahasan Perda.

⁶ Wawancara dengan Bapak Jufriзал, SE.M.Si 31 Januari 2022, di kantor DPRD Kuantan Singingi

Saran

1. Agar anggota DPRD meningkatkan kemampuan untuk membuat dan menyusun ranperda sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Agar Anggota dewan meningkatkan skill dalam dalam membentuk pelaksanaan tugas dan wewenang antara pemerintah daerah DPRD

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jimly Asshiddiqie, 2007 *pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm 48
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2

- ### B. Peraturan Perundang – Undangan
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah

C. Sumber Lain

- Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no.4(2017) : 463-475, hlm 464.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, SH., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi maupun Executive Summary dengan baik.